



PERSONEL PPK KEMBALI 5 ORANG

Rekrutmen Selesai, Dilantik Awal 2019

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya bergerak cepat menuntaskan penambahan personel Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2019. Hal ini lantaran personel PPK kembali harus dijabat lima orang, sementara sebelumnya hanya tiga orang. Meski rekrutmen sudah selesai, namun pelantikannya baru akan dilakukan awal tahun 2019.

"Sesuai dengan arahan dari KPU RI, personel baru untuk PPK akan kami lantik pada 2 Januari 2019," tandas Komisioner KPU Kota Yogya Aris Munandar, Rabu (12/12).

Menurut Aris, dalam amana Undang-undang Pemilu disebutkan personel PPK hanya tiga orang. Namun ada pihak yang melakukan judicial review terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu materi dalam judicial review ialah menyangkut personel PPK, dan telah disetujui oleh MK.

"Keputusan dari MK itu juga sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran oleh KPU RI. Sehingga kami juga langsung melakukan proses rekrutmen pada 10-28 November 2018 lalu. Sebelumnya kan sudah terbentuk tiga orang, jadi rekrutmen ke-

marin hanya tinggal menambah dua orang," imbuh Aris.

Proses rekrutmen pun dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga, yakni sejumlah lembaga pendidikan. Pihak ketiga tersebut menunjuk dua orang untuk diajukan ke KPU Kota Yogya. Selanjutnya, KPU Kota Yogya melakukan seleksi administrasi.

Aris mengatakan, meski dua orang anggota PPK tambahan belum dilantik, namun secara tidak pasif sudah ada yang mengikuti kegiatan di wilayah. Hanya, selama satu bulan beraktivitas, yang bersangkutan tidak mendapatkan gaji. "Karena belum dilantik maka belum memperoleh gaji. Namun kami mengapresiasi semangat mereka yang sudah ikut kegiatan PPK," jelasnya.

Terkait dengan gaji, sesuai dengan ketentuan ada perbedaan antara ketua dan anggota. Bagi ketua berhak mendapatkan Rp 1,8 juta perbulan, sedangkan anggota Rp 1,650 juta perbulan. Gaji diberikan selama masa

kerja, yakni enam bulan yang dihitung per Januari 2019 hingga Juni 2019.

Sementara penempatan anggota PPK tambahan, teknisnya diserahkan ke masing-masing wilayah. Bagi PPK yang hendak melakukan kocok ulang jabatan ketua dan divisi, dipersilakan. Namun jika tetap mempertahankan komposisi yang sekarang, juga tidak dipersoalkan. "Yang jelas ada lima divisi yakni hukum, sosialisasi, logistik, teknis, dan data informasi. Meski ada yang menjadi ketua, namun juga merangkap salah satu divisi," katanya. (Dhi-g)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005